

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN**

---

**NOTA DINAS**

NOMOR: AK.03.01/135/D.V.M.EKON.4/07/2026

Yth. : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama  
Dari : Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan  
Ekosistem Ketenagakerjaan  
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Asisten Deputi  
Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem  
Ketenagakerjaan Triwulan II T.A. 2026  
Tanggal : 10 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudari Nomor  
AK.03.01/1706/SET.M.EKON.1/06/2026 perihal Permintaan Penyusunan Narasi  
Kinerja Triwulan I dan II T.A. 2026, bersama ini disampaikan Laporan Narasi Capaian  
Kinerja Triwulan II T.A. 2026 Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan  
Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, untuk dapat dipergunakan dengan  
sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Saudari, diucapkan  
terima kasih.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan  
Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan



Chairul Saleh  
NIP 197608312002121001

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026**  
**Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem**  
**Ketenagakerjaan**

**A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2026**

| No        | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                             | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi s.d Triwulan II 2026 | Capaian (%) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>I</b>  | <b>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b>                        |            |                   |                    |                                |             |
| 1.1       | Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi                                                                                  | Persentase | 63,61 %           | 63,29%             | 60,66%*                        | 95,84%      |
| 1.2       | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                        | Persentase | 56,40 - 59,32 %   | 56,40-59,32%       | 56,41%                         | 100%        |
| 1.3       | Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional                                                                            | Persentase | 35,09 %           | 34,15%             | 34,13%                         | 99,94%      |
| 1.4       | Indeks Peningkatan Kompetensi Peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi                                            | Indeks     | 3 dari 4          | 3 dari 4           | N/A                            | N/A         |
| <b>II</b> | <b>Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b> |            |                   |                    |                                |             |
| 2.1       | Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja        | Persentase | 80%               | 40%                | 45%                            | 112,5%      |

|           |                                                                                                                                                                                                     |            |          |          |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------|
| 2.2       | Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian, Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan                                                       | Persentase | 80%      | 40%      | 45%        | 112,5%  |
| <b>IV</b> | <b>Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b> |            |          |          |            |         |
| 3.1       | Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan                                         | Indeks     | 3 dari 4 | 3 dari 4 | 3,7 dari 4 | 120%    |
| <b>IV</b> | <b>Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b>                                             |            |          |          |            |         |
| 4.1       | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan                                                         | Persentase | 92%      | 45%      | 50%        | 111,11% |

\*Sakernas BPS Tahun 2025

Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 4 indikator kinerja yaitu:

1. Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

3. Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
4. Indeks Peningkatan Kompetensi Peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Proporsi  
Pekerja yang  
Bekerja pada  
Bidang  
Keahlian  
Menengah  
Tinggi**

**Latar Belakang**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan pondasi utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu dari empat pilar utama, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global. Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi sangat penting, khususnya dalam memperbesar proporsi pekerja yang berada pada bidang keahlian menengah hingga tinggi. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi modern berbasis industri, teknologi, dan jasa bernilai tambah tinggi.

Untuk itu, proporsi pekerja yang berada di bidang keahlian menengah tinggi menjadi indikator penting untuk melihat sinergi penyediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian menengah tinggi melalui penguasaan teknologi, mampu beradaptasi pada inovasi, dan lebih produktif sehingga dapat bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dan tinggi. Tenaga kerja berkeahlian tinggi (*skilled labor*) adalah tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Tenaga kerja berkeahlian menengah (*semi-skilled labor*) adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan

seberapa dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian atau jabatan menengah dan tinggi dari keseluruhan total pekerja. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Sehingga, tenaga kerja dapat menghasilkan produktivitas tinggi dan produk yang bernilai tambah tinggi. Adapun pengukuran indikator ini, sebagai berikut:

$$Pekerja\ Berkeahlian = \left( \frac{\sum_{i=1}^6 y_i}{\sum_{i=0}^9 y_i} \right) \times 100\% ; i = 0,1,2, \dots, 9$$

Keterangan:

Pekerja Berkeahlian= Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi (%)

Yi = Jumlah pekerja dari aspek ke-i

0 = TNI/ Polri

1 = Manajer

2 = Profesional

3 = Teknisi dan asisten profesional

4 = Tenaga tata usaha

5 = Tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan

6 = Pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan

7 = Pekerja pengolahan, kerajinan, dan YBDI

8 = Operator dan perakitan mesin

9 = Pekerja kasar

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi tahun 2026 adalah 63,61% (y-o-y). Adapun rincian realisasi proporsi tenaga kerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi TW II 2026 dihitung berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2025 yaitu sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target TW II | Realisasi   | % Kinerja |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi | Persentase | 63,61%            | 63,29%       | 60,66%<br>* | 95,84%    |

\*Sakernas BPS Tahun 2025

Capaian Triwulan II Tahun 2026 saat ini masih menggunakan data sementara dengan *baseline* tahun 2025. Berdasarkan informasi dari BPS, data resmi untuk Triwulan II baru akan tersedia pada

Agustus 2026. Oleh karena itu, persentase capaian ini akan disesuaikan kembali setelah data resmi tersebut dirilis

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                                                        | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                | Analisis Pemetaan <i>Link and Match Supply and Demand</i> Penyiapan Tenaga Kerja Keahlian Menengah Tinggi | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah dilaksanakan <i>High-Level Roundtable Discussion Link and Match</i> Pelatihan dan Penempatan Kerja Kawasan yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan tanggal 23 April 2026.</li> <li>● Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja melalui intervensi pelatihan vokasi di KEK Batang dan KEK Kendal.</li> <li>● Telah dilaksanakan Rapat <i>Link and Match</i> Program Pelatihan Vokasi Nasional tanggal 23 Juni 2026 di Kemenko Perekonomian.</li> </ul> |
| 2.                | Penyiapan Tenaga Kerja yang mendukung transformasi ekonomi (contoh: digital, green jobs, hilirisasi, dll) | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah dilaksanakan <i>Kick-Off</i> Program Pelatihan Vokasi Nasional tanggal 8 April 2026 dan Pelaksanaan pelatihan vokasi nasional untuk mendukung penyiapan tenaga kerja dengan target 70.000 orang dan terealisasi sampai dengan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>TW II sebanyak 28.412 orang dengan berbagai jenis pelatihan yang ditawarkan termasuk di bidang <i>green job</i> dan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diskusi bersama Menaker pada tanggal 8 April 2026 dalam rangka optimalisasi pelatihan vokasi dan penempatan kerja.</li> <li>● FGD Pembahasan Hasil <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) untuk Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia tanggal 26 Mei 2026 oleh Kementerian PPN/Bappenas.</li> </ul> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam rangka mendukung peningkatan proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah tinggi, pemerintah memberikan Stimulus Kebijakan Q2 di bidang ketenagakerjaan berupa (i) penambahan target pelatihan vokasi nasional yang difokuskan kepada 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang terdampak PHK guna memberikan *reskilling* dan *upskilling* untuk kembali ke dunia kerja, dan (ii) pelaksanaan Program Magang Nasional tahap II yang akan menyasar 150.000 peserta *fresh graduate* perguruan tinggi. Selain itu, juga dilakukan pemetaan *Link and Match Supply and Demand* yang berfokus pada Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Program Strategis Nasional sebagai bagian dari penyelarasan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri yang dilaksanakan melalui skema *Tailor Made Training* (TMT).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah melalui efisiensi dalam penyediaan materi teknis. Bahan paparan dan dokumen diarahkan lebih

kepada bentuk digital (*paperless*). Dengan penggunaan digital maka distribusi informasi menjadi lebih *real-time*, serta berhasil meniadakan komponen biaya pengadaan untuk ATK. Efisiensi juga menggunakan ruang rapat internal dibandingkan menyewa tempat di luar kantor, hal ini meminimalisir biaya paket meeting dalam negeri. Untuk itu estimasi biaya pada Triwulan II adalah sekitar Rp 30.000.000 termasuk pelaksanaan rapat menggunakan Zoom.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi lintas K/L terkait tindak lanjut program SMK Go Global tanggal 27 April 2026 dalam rangka peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
2. Diskusi dengan Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS terkait pembahasan Indikator Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal tanggal 21 Mei 2026.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target, strategi dan upaya perbaikan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 dijalankan dengan baik melalui: (i) koordinasi dengan KP2MI terkait pelaksanaan program pelatihan *welder* dan *hospitality* yang salah satunya diimplementasikan melalui program SMK Go Global; serta (ii) koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengoptimalkan fitur dalam platform SiapKerja seperti maganghub, skillhub, dan karirhub dalam penyediaan program pemagangan nasional, pelatihan vokasi, serta lowongan pekerjaan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi, yaitu:

1. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah tinggi membutuhkan pelatihan peningkatan kompetensi dengan biaya pelatihan yang juga besar. Terbatasnya anggaran APBN karena efisiensi dan kurangnya kesadaran perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya menjadi salah satu kendala dan tantangan.
2. Belum selarasnya kebutuhan tenaga kerja oleh industri dengan output pendidikan dan pelatihan.

3. Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum optimal dalam mendorong peningkatan proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah tinggi.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa strategi dan upaya yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kolaborasi antara Kemenko Perekonomian, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus melalui intervensi pelatihan vokasi (Stimulus Ekonomi) dengan skema *Tailor Made Training*.

## **1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

### **Latar Belakang**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan telah mengalami stagnasi bahkan sejak tiga dekade yang lalu tanpa peningkatan yang berarti. Pada tahun 2025, TPAK perempuan berada di level 56,41%, masih dibawah TPAK laki-laki yang berada di level 84,4% (BPS, Agustus 2025). Hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan TPAK perempuan mencapai 70% pada tahun 2045. Sehingga diperlukan peningkatan TPAK perempuan setidaknya 1% setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya TPAK perempuan menurut beberapa studi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, beberapa hambatan antara lain: (i) terdapat keterbatasan representasi perempuan dalam jabatan senior dan managerial, (ii) diskriminasi eksplisit dan implisit seperti pembatasan usia dan fleksibilitas mobilitas yang dianggap merugikan perempuan yang mencari pekerjaan setelah berhenti bekerja akibat melahirkan, (iii) segregasi pekerjaan di mana perempuan kurang terwakili di sektor bernilai tambah tinggi, dan (iv) serta insiden kekerasan berbasis gender di tempat kerja.

Dari sisi *supply side*, norma sosial kita masih membagi peran dalam rumah tangga dimana laki-laki kerap dipandang sebagai *breadwinner* dan perempuan sebagai *homemaker*. Pekerjaan domestik dan pengasuhan dipandang sebagai tanggung jawab perempuan. Tanggung jawab tersebut tidak hilang ketika

perempuan juga bekerja di luar rumah (*paid work*). Sehingga, perempuan yang bekerja juga kerap harus menanggung beban ganda untuk *paid work* dan *reproductive work*. Selain itu, keterbatasan akses seperti akses informasi lapangan pekerjaan, akses terhadap sarana dan prasarana transportasi untuk mobilitas sehari-hari (*commuting*) yang aman dan akses terhadap alternatif pengasuhan terutama di daerah pedesaan juga menjadi penghambat perempuan untuk bekerja.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi perempuan usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi dibandingkan dengan seluruh jumlah perempuan dalam kelompok usia kerja. TPAK perempuan penting untuk mengukur kontribusi dan peran perempuan dalam perekonomian, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan kesetaraan gender.

Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memperoleh akses terhadap pasar tenaga kerja dan berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai TPAK yang rendah dapat mencerminkan adanya hambatan struktural atau sosial, seperti beban kerja domestik, diskriminasi gender, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, atau kurangnya dukungan kebijakan yang memungkinkan perempuan bekerja secara produktif.

Dalam hal ini, Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan sebagai bagian dari penguatan daya saing SDM nasional. Peran ini berfokus pada penghapusan hambatan struktural dan sosial, seperti beban kerja domestik serta diskriminasi gender, guna memperluas akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Melalui penyelarasan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, diharapkan kontribusi perempuan dalam ekonomi dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2026 adalah 56,40 – 59.32% (yoy). Adapun rincian realisasi Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan hingga TW II 2026 dihitung berdasarkan data Sakernas Februari 2026 yaitu sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                     | Satuan            | Target Tahun 2026     | Target Triwulan II    | Realisasi     | % Kinerja     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <i>IKU 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i> | <i>persentase</i> | <i>56,40 – 59,32%</i> | <i>56,40 – 59,32%</i> | <i>56,41%</i> | <i>100,2%</i> |

Berdasarkan Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Tahun 2026 tercatat mencapai 56,41%.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                        | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                | Pembahasan finalisasi kebijakan tentang Ekonomi Perawatan | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pada 30 April 2026, telah disahkan Undang-Undang No 2 tahun 2026 tentang Pekerja Rumah Tangga. UU ini menjadi landasan hukum perlindungan pekerja perawatan.</li> <li>● Pada 13 Mei 2026 telah dilaksanakan FGD Pemberdayaan Ekonomi Perempuan</li> <li>● Pada 19 Mei 2026 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan</li> </ul> |

|    |                                                |            |                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |            | Perlindungan Perempuan Pekerja                                                                                                                                 |
| 2. | Pemetaan Detail Peta Okupasi Pekerja Perawatan | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah diluncurkan Peta Okupasi Pekerja Perawatan pada tanggal 11 Juni 2026 untuk mendukung RPJMN 2025-2029</li> </ul> |

Isu ekonomi perawatan (*care economy*) saat ini menjadi salah satu prioritas agenda ketenagakerjaan nasional. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih berada pada 56,41% jauh di bawah TPAK laki laki sebesar 84,57% (Sakernas, Februari 2026). Capaian TPAK Perempuan turun sebesar 0,04 persen poin bila dibandingkan TPAK Perempuan pada Februari 2025 lalu. Salah satu faktor struktural penyebab ketimpangan tersebut adalah ketimpangan beban pengasuhan pada perempuan. Dalam hal ini, salah satu strategi mengurangi beban pengasuhan dan meningkatkan TPAK Perempuan dalam Dokumen Peta Jalan Ekonomi Perawatan adalah melalui penyediaan fasilitas pengasuhan anak.

Sebagai langkah awal, telah dimulai juga penyusunan Rekomendasi Kebijakan mengenai persepsi beban pengasuhan dan kebutuhan penyediaan fasilitas layanan penitipan anak (*daycare*) di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Adapun pelaksanaan sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan persuratan secara digital juga penyebaran survei terkait *care economy* secara digital diupayakan untuk tetap meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran berkisar senilai Rp 10.000.000.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target, strategi dan upaya perbaikan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, diantaranya pelaksanaan pelatihan vokasi nasional sebagai bagian dari stimulus ekonomi dengan jumlah peserta 28.412 orang menyasar 14.220 perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Selain itu, program pemagangan nasional yang jumlah

pesertanya adalah 102.696 orang (63.96% perempuan, 36.04% laki-laki) dan Peta Okupasi Pekerja Perawatan sudah ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2026.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi, yaitu:

1. Isu gender dan ekonomi perawatan (*care economy*) masih ditangani secara sektoral dan parsial, tersebar di berbagai K/L tanpa kerangka kebijakan yang terintegrasi. Diperlukan mekanisme koordinasi data dan kebijakan lintas sektor agar ekonomi perawatan diarusutamakan secara sistemik, bukan sekadar program tambahan (*add-on*).

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2026 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan lebih banyak diseminasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan lintas sektor terkait isu gender dan ekonomi perawatan agar dapat diintegrasikan dalam kebijakan sektoral;

### **1.3 Cakupan**

#### ***Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional***

### **Latar Belakang**

Dalam rangka melindungi pekerja, Indonesia telah memiliki serangkaian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang programnya terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan data penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun sebesar 147,67 juta orang yang bekerja sedangkan Total pekerja yang terdaftar pada Jaminan sosial sebesar 47,2 juta pekerja (hanya 31,96% dari total penduduk yang bekerja) yang terdiri dari Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah penduduk bekerja, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 31,96% (Data Satkernas per Februari 2026).

Keterbatasan cakupan jaminan sosial mengakibatkan pekerja, khususnya pada kelompok rentan, berpotensi mengalami penurunan kesejahteraan hingga jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi seperti disrupsi geopolitik global saat ini terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem jaminan sosial menjadi krusial, tidak hanya dalam memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga dalam menjaga daya beli masyarakat, menciptakan stabilitas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik dan penguatan kepercayaan di pasar tenaga kerja.

Indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan proksi perlindungan sosial nasional yang diukur melalui rasio jumlah pekerja dengan kepesertaan minimal pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) terhadap total penduduk bekerja. Sebagai instrumen penguatan daya saing SDM, indikator ini mencerminkan sejauh mana negara hadir dalam memberikan jaring pengaman ekonomi bagi tenaga kerja dari berbagai risiko sosial-ekonomi.

Dalam mencapai target IKU tersebut, Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor untuk menyelaraskan program JKP, JKK, JKm, JHT, dan JP. Upaya strategis ini difokuskan pada perluasan cakupan dari sektor formal hingga ke pekerja informal (Bukan Penerima Upah), guna memastikan implementasi kebijakan oleh K/L teknis selaras dengan agenda pembangunan ekonomi nasional. Adapun perhitungan indikator ini, sebagai berikut:

*Cakupan Jamsos Naker*

$$= \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan PMI.
2. Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional tahun 2026 adalah 35,09%. Berdasarkan

data per Mei 2026, tercatat tingkat kepesertaan Jamsostek sebesar 34,13%. Adapun rincian Realisasi Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                           | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi | % Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| IKU- 1.3 Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional | Persentase | 35,09 %           | 34,15 %            | 34,13 %   | 99,94 %   |

Perhitungan capaian diatas didapat berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2026 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

| No    | Kategori                       | Jumlah (orang) |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 1     | Penerima Upah (PU)             | 27.767.674     |
| 2     | Bukan Penerima Upah (BPU)      | 12.582.234     |
| 3     | Konstruksi                     | 5.975.147      |
| 4     | Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 724.645        |
| Total |                                | 47.049.700     |

Total Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun adalah 137.846.146 orang, sehingga cakupan kepesertaan jamsosnaker adalah

$$= (47.049.700/137.846.146) \times 100\%$$

$$= 34,13\%$$

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                                                                   | Status     | Keterangan                                                                                                                                           |
| 1.                | Monitoring implementasi kebijakan terkait penyesuaian iuran JKK dan JKm bagi Peserta Bukan Penerima Upah Sektor UMKM | Terlaksana | ● Monitoring implementasi kebijakan diskon iuran JKK dan JKm untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) dengan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan |
| 2.                | Monitoring perluasan manfaat dan cakupan kepersertaan jamsostek sektor UMKM                                          | Terlaksana | ● Rapat Penyelenggaraan Jamsostek bagi Penerima KUR tanggal 5 Juni 2026                                                                              |

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepesertaan Jamsostek melalui beberapa kebijakan, antara lain:

1. Memastikan implementasi PP 50/2025 tentang Penyesuaian iuran JKK dan JKm sebesar 50% bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang berlangsung hingga Maret 2027 berjalan dengan efektif.
2. Memastikan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres No. 2/2021.
3. Identifikasi awal kendala implementasi kebijakan jamsostek bagi penerima KUR yang diatur dalam Permenko Perekonomian 1/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Adapun pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja

sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui optimalisasi belanja alat tulis kantor.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Berdasarkan strategi dan upaya yang telah direncanakan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana, dilakukan berbagai langkah tindak lanjut untuk mendukung peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta memperkuat koordinasi dalam mitigasi risiko pelemahan pasar tenaga kerja, antara lain: (i) telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama KSP, Kemnaker, Pemda Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan di provinsi Jawa Barat meskipun sempat tertunda hingga bulan Juli 2026, (ii) monitoring kebijakan stimulus ekonomi pemberian diskon iuran JKK dan JKM bagi BPU bersama Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi, yaitu:

1. Adanya ketidakpastian perekonomian global serta melemahnya nilai tukar berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Selama Januari-Mei 2026 terdapat 23.470 kasus PHK.
2. Belum berkesinambungannya kepesertaan Jamsostek Penerima KUR. Berdasarkan data BPJS TK hingga Mei 2026, jumlah penerima KUR yang memiliki masa kepesertaan Jamsostek lebih dari 1 tahun hanya 496 ribu dari total penerima yang pernah terdaftar sebanyak 2,8 juta penerima.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Koordinasi untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan kebijakan diskon iuran JKK dan JKm serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan
2. Evaluasi menyeluruh terkait keberlanjutan kepesertaan Jamsostek bagi Penerima KUR.

## **1.4 Indeks Peningkatan Kompetensi Peserta**

### **Latar Belakang**

Pembangunan SDM unggul menghadapi tantangan besar dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja muda. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran

**Pemagangan  
Lulusan  
Perguruan  
Tinggi untuk  
Stimulus  
Ekonomi**

Terbuka (TPT) berada di angka 4,85%, di mana kelompok dengan usia 15-24 tahun memberikan porsi paling besar dengan TPT mencapai 16,89%. Selain itu, masih terdapat tingginya angka *Not in Employment, Education, or Training* (NEET) yang mencapai 19,44% di tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan rendahnya keterserapan angkatan kerja muda akibat kualifikasi pendidikan yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan salah satu dari 8 Paket Akselerasi Ekonomi 2025 yang digulirkan pemerintah untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja. Program pemagangan ini merupakan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh penyelenggara program pemagangan lulusan perguruan tinggi di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai pekerjaan dan proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

Peningkatan kompetensi dilihat dari rekapitulasi penilaian mentor kepada peserta magang terdiri dari 8 (delapan) aspek sebagai berikut:

1. Kehadiran dan disiplin
2. Sikap dan perilaku
3. Kemampuan komunikasi
4. Inisiatif dan tanggung jawab
5. Kemampuan adaptasi
6. Pengetahuan teknis
7. Produktivitas dan ketepatan waktu
8. Kerjasama tim

Rekapitulasi Penilaian ini akan diperoleh setelah peserta magang menyelesaikan pemagangan.

Masing-masing aspek tersebut diukur dengan skala likert (1) Kurang, (2) Cukup, (3) Baik, dan (4) Sangat Baik. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil penilaian yang telah diisi oleh mentor terhadap seluruh peserta pemagangan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

### *Indeks Kompetensi*

$$= \frac{\sum \text{Skor kompetensi total peserta yang menyelesaikan pema}}{\text{Jumlah aspek penilaian} \times \text{Total peserta yang menyelesaikan per}}$$

Target keberhasilan dinyatakan tercapai apabila memenuhi nilai target yaitu 3 dari 4.

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target Indeks Peningkatan Kompetensi oleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi tahun 2026 adalah 3 dari 4. Adapun rincian realisasi Indeks Peningkatan Kompetensi oleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi hingga TW II 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                        | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi | % Kinerja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| IKU- 1.4 Indeks Peningkatan Kompetensi oleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi | Persentase | 3 dari 4          | 3 dari 4           | N/A       | N/A       |

Capaian Indeks Peningkatan Kompetensi oleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi belum dapat dihitung mengingat masih menunggu data final dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan survey evaluasi yang dilakukan kepada peserta magang dan mentor pada pelaksanaan batch 1, terdapat peningkatan kompetensi teknis sebesar 63% dari peserta magang. Selain itu, 85% peserta magang merasa puas dengan pelaksanaan program pemagangan nasional, dan 34% peserta magang mendapatkan tawaran direkrut sebagai karyawan (tetap/kontrak) oleh perusahaan tempat magang. Selain itu, Kemnaker juga menawarkan kepada peserta magang untuk mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP secara gratis.

Dalam rangka peningkatan *soft skill* kepada peserta magang, Kementerian Ketenagakerjaan juga melaksanakan berbagai pelatihan secara daring diantaranya (1) *design thinking*, (2) *digital*

*disruption and transformation*, (3) *self efficacy*, (4) *emotional intelligence*, (5) *social influence*, (6) pentingnya sikap & perilaku positif serta nilai spiritual dalam bekerja, (7) tips dan trick melamar kerja melalui Karir Hub SiapKerja, dan (8) membangun mental pekerja, tangguh, dan berkarakter melalui bela negara.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                            | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                | Monitoring Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025 | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di BRI Kanwil Surabaya tanggal 9 Juni 2026.</li> <li>● Telah dilaksanakan <i>Talk Show</i> Pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi bagi Peserta Magang di Lingkup Kemenko Perekonomian tanggal 13 Mei 2026.</li> </ul> |
| 2.                | Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025               | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi tanggal 18 Mei 2026 bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PPN/Bappenas.</li> </ul>                                                                                                                     |

|    |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Penyiapan Pelaksanaan Program Tahun 2026 | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah dilakukan koordinasi dengan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengusulkan anggaran ABT ke Kementerian Keuangan untuk keberlanjutan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 yang ditargetkan 150 ribu peserta.</li> <li>● Pelaksanaan Rapat Harmonisasi RPermenaker Perubahan Kedua Permenaker 8/2025 tanggal 4 Juni 2026.</li> </ul> |
|----|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 1-3 telah selesai dilaksanakan. Sampai dengan TW II Tahun 2026, terdapat 84.758 orang peserta magang yang menyelesaikan pemagangan dari 102.696 yang ditetapkan. Peserta magang ini tersebar di 5.168 perusahaan dan 2.886 Satker K/L.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah melalui efisiensi dalam penyediaan materi teknis. Bahan paparan dan dokumen diarahkan lebih kepada bentuk digital (*paperless*). Dengan penggunaan digital maka distribusi informasi menjadi lebih *real-time*, serta berhasil meniadakan komponen biaya pengadaan untuk ATK. Efisiensi juga menggunakan ruang rapat internal dibandingkan menyewa tempat di luar kantor, hal ini meminimalisir biaya paket meeting dalam negeri. Untuk itu estimasi biaya pada Triwulan II adalah sekitar Rp 10.000.000 termasuk pelaksanaan rapat menggunakan Zoom.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target, strategi dan upaya perbaikan yang dilakukan Triwulan I tahun 2026 telah dijalankan dengan hasil yang baik diantaranya: (i) Surat Persetujuan Presiden melalui Mensetneg

terkait keberlanjutan program magang di tahun 2026 sudah ada termasuk besaran anggarannya yang telah ditindaklanjuti oleh Kemnaker dengan pengusulan anggaran ABT ke Kementerian Keuangan, (ii) Evaluasi bersama masih terus dilakukan melibatkan Kantor Staf Presiden, Bappenas, dan Kemnaker selaku pelaksana program dalam rangka perbaikan program ke depan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi, yaitu:

1. Terdapat penurunan peserta magang aktif dari jumlah yang ditetapkan di awal (102.696 orang) dengan berbagai alasan, seperti kendala lokasi, sudah diterima kerja, maupun mengundurkan diri dengan alasan lainnya. (84.758 peserta magang yang menyelesaikan sampai akhir)
2. Tingginya proporsi penempatan magang di Kementerian /Lembaga (mencapai 40%) menjadi kendala dalam optimalisasi penyerapan peserta magang menjadi pegawai/karyawan. Berbeda dengan peserta magang di industri, banyak peserta magang yang direkrut langsung menjadi pegawai setelah magang selesai.
3. Pelaksanaan Program Pemagangan Tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada awal Juli 2026, mundur menjadi awal Agustus 2026 dikarenakan masih proses penganggaran.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa strategi dan upaya yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi bersama Kemnaker selaku K/L penanggungjawab pelaksanaan program.
2. Mendorong Kemnaker untuk lebih meningkatkan porsi magang di industri dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
3. Mendorong percepatan penganggaran sehingga program dapat segera diimplementasikan.

Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh pencapaian 2 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian, Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## **2.1 Persentase**

***Efektivitas  
Penyelenggaraan  
Sinkronisasi,  
Koordinasi, dan  
Pengendalian  
Kebijakan di  
Bidang  
Peningkatan  
Produktivitas  
Tenaga Kerja***

## **Latar Belakang**

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, antara lain:

1. *Link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja;
2. Koordinasi pelatihan welder dan hospitality untuk penempatan kerja; dan
3. Isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu (1) perencanaan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan (4) transparansi dan partisipasi publik.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait

bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dilakukan sebagai berikut:

*% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama (20%) + Nilai Tahapan Kedua (25%) + Nilai Tahapan Ketiga (27,5%) + Nilai Tahapan keempat (27,5%)*

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target Triwulan II pada IKU ini sebesar 40%. Adapun rincian realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja hingga TW II 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                 | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi | % Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| IKU 2.1<br>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase | 80%               | 40%                | 45%       | 112,5%    |

Realisasi TW II 2026 menunjukkan bahwa koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilakukan berada di tahap implementasi kebijakan melalui koordinasi program pemagangan tahun 2025 dan pelatihan vokasi nasional, serta evaluasi dan keberlanjutan kebijakan melalui koordinasi persiapan pelaksanaan program pemagangan tahun 2026 dan peningkatan kapasitas pelatihan vokasi nasional yang menyasar pada lulusan SMK dan pekerja yang terdampak PHK.

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                         | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                | Koordinasi pelaksanaan pelatihan <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i>      | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapat Koordinasi lintas K/L terkait tindak lanjut program SMK Go Global tanggal 27 April 2026 bersama KSP dalam rangka peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                | Monitoring Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telah dilaksanakan <i>High-Level Roundtable Discussion Link and Match</i> Pelatihan dan Penempatan Kerja Kawasan yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan tanggal 23 April 2026.</li> <li>● Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja melalui intervensi pelatihan vokasi di KEK Batang dan KEK Kendal (2 Juni 2026), KEK Gresik (20 Juni 2026).</li> <li>● Telah dilaksanakan Rapat <i>Link and Match</i> Program Pelatihan Vokasi Nasional tanggal 23 Juni 2026 di Kemenko Perekonomian.</li> <li>● Telah dilakukan koordinasi dengan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengusulkan anggaran ABT ke Kementerian Keuangan untuk keberlanjutan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 yang ditargetkan 150 ribu peserta dan anggaran Program Pelatihan Vokasi Nasional</li> </ul> |

Selain itu, juga dilakukan koordinasi bersama dengan K/L terkait, antara lain:

1. Diskusi bersama Menteri Ketenagakerjaan tanggal 8 April 2026 dalam rangka optimalisasi pelatihan vokasi dan penempatan kerja.
2. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi sebagai salah satu program Direktif Presiden bersama Kantor Staf Presiden.
3. Koordinasi atas pelaksanaan Kegiatan Job Fair dan PMI Expo 2026 sebagai implementasi program SMK Global yang dilakukan oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat tanggal 25 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah melalui efisiensi dalam penyediaan materi teknis. Bahan paparan dan dokumen diarahkan lebih kepada bentuk digital (*paperless*). Dengan penggunaan digital maka distribusi informasi menjadi lebih real-time, serta berhasil meniadakan komponen biaya pengadaan untuk ATK. Efisiensi juga menggunakan ruang rapat internal dibandingkan menyewa tempat di luar kantor, hal ini meminimalisir biaya paket meeting dalam negeri. Untuk itu estimasi biaya pada Triwulan II adalah sekitar Rp 50.000.000 termasuk pelaksanaan rapat menggunakan Zoom.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target, strategi dan upaya perbaikan yang dilakukan Triwulan I tahun 2026 telah dijalankan dengan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengoptimalkan fitur dalam platform SiapKerja seperti maganghub, skillhub, dan karirhub dalam penyediaan program pemagangan nasional, pelatihan vokasi, serta lowongan pekerjaan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi, yaitu:

1. Sistem Informasi Pasar Kerja sebagai acuan perencanaan tenaga kerja sesuai Perpres Revitalisasi Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi belum selesai dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Implementasi Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan skema *tailor made training* masih terkendala terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki BLK setempat yang belum sesuai dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa strategi dan upaya yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong Kemnaker mempercepat pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja sebagai basis perencanaan kebutuhan tenaga kerja nasional yang terintegrasi dan berbasis data.
2. Memperkuat kapasitas penyelenggara pelatihan melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelatihan yang dimiliki oleh Perusahaan.
3. Penguatan Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.

## **2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian, Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan**

### **Latar Belakang**

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, antara lain:

1. Kebijakan terkait upah minimum;
2. Penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan; dan

3. Isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu (1) perencanaan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan (4) transparansi dan partisipasi publik.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, dilakukan sebagai berikut:

*% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama (20%) + Nilai Tahapan Kedua (25%) + Nilai Tahapan Ketiga (27,5%) + Nilai Tahapan keempat (27,5%)*

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Adapun target Triwulan II pada IKU ini sebesar 40%. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan hingga TW II 2026 adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                  | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi | % Kinerja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| IKU-2.2<br>Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian, Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan | Persentase | 80%               | 40%                | 45%       | 112,5%    |

Realisasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan telah menghasilkan

berbagai produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun peraturan teknis di level K/L. Pada periode yang sama juga telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan upah minimum di Maluku Utara sebagai bagian dari penguatan fungsi pengendalian, yang difokuskan pada pemantauan dinamika penetapan, kepatuhan pemerintah daerah, identifikasi kendala di lapangan, serta penghimpunan masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan awal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan upah minimum di berbagai daerah.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW I                                                             | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                | Monitoring implementasi kebijakan upah minimum wilayah Indonesia Timur/Tengah | Terlaksana | ● Monitoring dan Evaluasi Upah Minimum Provinsi di Provinsi Maluku Utara                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                 | Penyusunan kebijakan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan      | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penerbitan UU 2/2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga</li> <li>● Penerbitan Perpres 27/2026 terkait Pelindungan Pekerja Transportasi Online</li> <li>● Penerbitan Perpres 25/2026 tentang Pengesahan Convention Concerning Work In The Fishing Sector, International Labour</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Organization Convention<br>188<br>● Penerbitan Permenaker<br>7/2026 tentang Pekerjaan<br>Alih Daya |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah melalui efisiensi dalam penyediaan materi teknis. Bahan paparan dan dokumen diarahkan lebih kepada bentuk digital (*paperless*). Dengan penggunaan digital maka distribusi informasi menjadi lebih real-time, serta berhasil meniadakan komponen biaya pengadaan untuk ATK. Efisiensi juga menggunakan ruang rapat internal dibandingkan menyewa tempat di luar kantor, hal ini meminimalisir biaya paket meeting dalam negeri. Untuk itu estimasi biaya pada Triwulan II adalah sekitar Rp 20.000.000

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sebagai tindak lanjut atas upaya perbaikan yang telah dirumuskan pada Triwulan I, pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan berbagai upaya dalam mendukung penguatan koordinasi dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan, diantaranya: (i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penetapan upah minimum bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan penetapan upah minimum; serta (ii) koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti berbagai isu ketenagakerjaan yang menjadi prioritas Presiden sebagai bagian dari persiapan peringatan May Day Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun pada Triwulan II telah diterbitkan sejumlah produk hukum, beberapa di antaranya belum dapat diberlakukan secara utuh karena masih memerlukan aturan pelaksana.

Selain itu, hasil monitoring pelaksanaan ketentuan upah minimum menunjukkan bahwa di sejumlah daerah masih terdapat kendala dalam implementasi regulasi. Kendala tersebut antara lain berupa

belum optimalnya pelaksanaan amanat regulasi serta adanya perbedaan pemahaman dalam penerapan ketentuan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni:

1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mendorong penyusunan aturan pelaksana.
2. Koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menemukan solusi atas permasalahan implementasi aturan terkait upah minimum.
3. Koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memonitor implementasi Perpres 27/2026 terkait Pelindungan Pekerja Transportasi Online berupa penyesuaian tarif aplikasi (maksimal 8%) di seluruh platform transportasi online.

3

**Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas di Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: “Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan “

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan**

**Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan merupakan hasil pengukuran tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri

atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- a. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- b. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- c. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- d. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Adapun target Triwulan II pada IKU ini sebesar 3 dari 4. Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja 3.1 yaitu sebesar 3,71 dari 4 atau mencapai 120% dari target Triwulan II Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                   | Satuan | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi    | % Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan | Indeks | 3 dari 4          | 3 dari 4           | 3,71 dari 4* | 120%      |

Dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan tahap pertama yang dilakukan pada triwulan II tahun 2026 dilakukan kepada mitra kerja yang terdiri dari 12 responden.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                                                                                                                                                                                       | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                | Pelaksanaan dan pelaporan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Semester 1 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya | Terlaksana | Telah dilaksanakan survey layanan semester 1 tahun 2025 melalui kuesioner <i>google form</i> kepada mitra kerja (12 responden) yang berkoordinasi secara aktif terkait isu strategis di bidang ketenagakerjaan pada rentang waktu Semester 1 tahun 2025,<br><br>Adapun responden survey terdiri dari perwakilan Kemenko PM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemensetneg, Kementerian Perdagangan, DEN, dan ILO. |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada survei dilakukan dengan memanfaatkan *google form* dalam penyebaran survei sebagai bentuk efisiensi anggaran. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk

anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan untuk melakukan koordinasi dan monitoring langsung pada isu strategis.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan masih dilakukan secara terpisah di akhir periode pelaporan sehingga sulit untuk mendapatkan responden.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Survey akan dibagikan bersamaan dengan pelaksanaan rapat koordinasi atau kegiatan lainnya yang melibatkan mitra kerja.

**4**

### **Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas di Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1 Persentase**

***Pelaksanaan  
Rencana Aksi  
Reformasi  
Birokrasi Asisten  
Deputi***

#### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Peningkatan

**Peningkatan  
Produktivitas dan  
Pengembangan  
Ekosistem  
Ketenagakerjaan**

Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan . Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU (TW I)
2. Penyusunan Matrik Peran Hasil/MPH (TW I)
3. Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026 (TW I, II, III, IV)
4. Penyusunan TOR dan RAB Renja 2027, serta draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 (TW II)
5. Penyusunan matriks manajemen risiko (TW III)
6. Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026 (TW I,II,III,IV)
7. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV)
8. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I, II, III, IV)
9. Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan :

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Adapun target Triwulan II pada IKU ini sebesar 45,0%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja 4.1 yaitu sebesar 50% atau mencapai 111,11% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                         | Satuan      | Target Tahun 2026 | Target Triwulan II | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan | Presen-tase | 92%               | 45%                | 50%       | 111,11%   |

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja |                                                                              |            |                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Rencana Aksi TW II                                                           | Status     | Keterangan                                                                        |
| 1.                | Penyusunan TOR dan RAB Renja 2027, serta Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 | Terlaksana | ● Telah disusun TOR dan RAB Renja 2027, serta Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 |
| 2.                | Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026                        | Terlaksana | ● Telah dilaksanakan revisi renja 2026                                            |

|    |                                        |                  |                                                             |
|----|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3. | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan  | Terlaksana       | ● Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III   |
| 4. | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI      | Terlaksana       | ● Telah diimplementasikan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI |
| 5. | Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026 | Belum Terlaksana | ● Belum ada himbuan pengisian bukti dukung RB Tematik 2026  |

Selama Triwulan II tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi telah mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya. Langkah ini diwujudkan melalui digitalisasi materi teknis, di mana dokumen dan bahan paparan dialihkan ke format tanpa kertas (*paperless*) sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, penghematan juga dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat internal guna menekan biaya penyewaan tempat di luar kantor. Melalui berbagai penyesuaian tersebut, estimasi kebutuhan biaya pada Triwulan II tercatat sekitar Rp10.000.000.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target, strategi, dan upaya perbaikan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2026 telah dijalankan dengan hasil yang baik, diantaranya: (i) sistem pemantauan dokumen SPJ telah selesai dikembangkan, (ii) telah dikoordinasikan alur kerja permintaan dokumen refund yang efektif efisien dengan agen perjalanan. Untuk itu, kendala dalam Triwulan I tahun 2026, telah terselesaikan dengan baik.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sistem pemantauan dokumen SPJ terintegrasi namun masih perlu penguasaan dari *user*;
2. Pelaksanaan survei untuk kelengkapan pendukung dalam reformasi birokrasi masih terpisah-pisah sehingga sulit mendapatkan responden

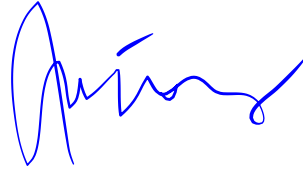
Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IIA tahun 2026, maka disusun beberapa

upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sistem pemantauan dokumen SPJ terus dibiasakan untuk digunakan *user*,
2. Sudah ada inisiasi untuk menyederhanakan proses pelaksanaan survei mendukung Reformasi Birokrasi yang mulai dilakukan pada triwulan III tahun 2026 melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Peningkatan  
Produktivitas dan Pengembangan  
Ekosistem Ketenagakerjaan,



Chairul Saleh